

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan suatu pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu pemerintah disini merumuskan berbagai kebijakan yang akan diatur dalam bentuk anggaran. Anggaran disini akan dapat terlihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dapat dilaksanakan suatu kewajiban pertanggungjawaban yang akan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan kemudian pelaksanaan dalam tugas dan fungsi pemerintah untuk mewujudkan suatu visi dan misi yang sudah ditetapkan.

Di lingkungan pemerintah daerah menghimpun dan membelanjakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan anggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diprovinsi/kota/kabupaten, tetap akan terlibat juga dalam organisasi perangkat daerah yang akan bekerja di instansi-instansi pemerintah.

Pemerintah Jepara merupakan suatu pemerintahan yang menginginkan setiap organisasi perangkat daerahnya mempunyai kinerja yang benar dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugasnya baik dalam hal

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, pengawasan dan juga evaluasi yang termasuk didalamnya yaitu pertanggungjawaban anggaran. Keterlibatan itu semua sangat dibutuhkan dalam meningkatkan suatu komitmen dalam suatu target anggaran. Dalam pencapaian suatu target anggaran sangat di inginkan oleh mereka. Tetapi, demi meningkatkan karir yang lebih tinggi dimasa mendatang, kinerja tersebut memotivasi untuk melakukan senjangan anggaran.

Anggaran merupakan suatu titik awal munculnya dana yang akan digunakan sebagai biaya program-program yang berjalan dipemerintah. Anggaran digunakan sebagai suatu alat perencanaan yang mempunyai peranan dalam merencanakan pembiayaan dan pendapatan pada pusat pertanggungjawaban yang akan dicapai dipemerintah daerah dengan melaksanakan suatu kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Alat pengendalian anggaran ikut berperan dipenilaian kinerja kepala dinas untuk melihat sejauh mana bisa mencapai target yang ditetapkan. Penganggaran berbasis kinerja yang digunakan pemerintah seharusnya bisa meningkatkan suatu pelayanan kepada masyarakat dengan baik, tetapi terkadang kinerja yang diinginkan tidak sesuai dengan program atau rencana kerja yang sudah ditetapkan.

Didalam penyusunan anggaran diperlukan adanya komunikasi yang baik antara organisasi perangkat daerah dengan masyarakat supaya organisasi perangkat daerah bisa mengetahui yang diharapkan masyarakat, kemudian masyarakat pun juga dapat mengetahui kondisi atau kekurangan pada sistem

penganggaran yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah tersebut. Jadi, kedua belah pihak bisa saling mengerti atas kondisi dan kekurangannya.

Suatu anggaran yang dibuat didalam suatu organisasi perangkat daerah harus selaras dengan tujuan secara umum dan mendukung dari masing-masing suatu divisi yang khusus, supaya tidak terjadi senjangan didalam suatu pengeluaran yang ada disalah satu organisasi perangkat daerah. Anggaran berisi suatu langkah-langkah yang akan ditempuh untuk merealisasikan suatu tujuan didalam kebijakan anggaran diperlukan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran yang merupakan seorang karyawan dan kepala dinas didalam suatu pemerintahan.

Senjangan anggaran merupakan suatu senjangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan program-program anggaran yang ada di organisasi perangkat daerah ketikaturut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dengan memberikan usulan dan estimasi anggaran yang tidak sesuai dengan sumberdaya yang sebenarnya dibutuhkan, dengan maksud agar anggaran tersebut mudah direalisasikan. Pihak yang ikut dalam penyusunan program anggaran melakukan ini dengan meninggikan jumlah biaya yang dibutuhkan atau merendahkan pendapatan yang sesungguhnya bisa dicapai. Proses penyusunan anggaran terdapat variabel yang mempengaruhi senjangan anggaran diantaranya yaitu partisipasi penganggaran, asimetri informasi, budaya organisasi, komitmen organisasi dan penekanan anggaran.

Menurut Yulianti (2014) partisipasi penganggaran adalah sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para anggota organisasi dalam

pencapaian tujuan dan kerjasama untuk mencapai suatu rencana. Partisipasi penganggaran juga merupakan metode yang paling baik dalam penyusunan anggaran, dimana semua komponen yang ada dalam organisasi ikut terlibat dalam penyiapan anggaran dan penganggaran partisipasi ini akan menghasilkan hubungan baik antara atasan dan bawahan menurut Krishnan dkk (2012).

Asimetri informasi menurut Arthaswadaya (2015) merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan dengan informasi yang dimiliki atasan mengenai suatu unit tanggungjawab pada sebuah organisasi. Adanya asimetri informasi akan menimbulkan salah satu faktor yang memicu yaitu seperti senjangan anggaran. OPD biasanya melakukan senjangan anggaran karena untuk menghindari suatu risikonya dengan cara memberikan suatu informasi yang biasa agar tidak ada yang curiga adanya suatu senjangan. Tetapi apabila masyarakat dengan OPD bisa lebih memahami apa yang bisa dicapai pada tanggungjawab individu masing-masing maka senjangan pun akan menurun.

Menurut Wati dkk (2017) budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan sistem nilai yang diikuti oleh anggota organisasi yang kemudian akan mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota dalam organisasi. Adanya suatu budaya organisasi didalam suatu organisasi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang beretika sehingga senjangan anggaran dapat dihindarkan. Jadi apabila karyawan diberikan sebuah nilai kepercayaan, maka kemungkinan terjadinya senjangan anggaran sangat kecil.

Komitmen organisasi menurut Dianthi dan Wirakusuma (2017) adalah loyalitas karyawan terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran, nilai-nilai organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi serta keinginan untuk bertahan didalam organisasi. Apabila individu mempunyai komitmen organisasi yang kuat akan menyebabkan individu untuk berusaha mencapai tujuan organisasi. Sementara jika individu lebih mementingkan diri sendiri maka individu tersebut akan melakukan senjangan anggaran agar kinerjanya terlihat baik, sebaliknya jika individu lebih mementingkan organisasi maka terjadinya senjangan anggaran akan rendah.

Penekanan anggaran merupakan penekanan dari atasan kepada seorang bawahan atas anggaran yang digunakan sebagai tolak ukur kinerjanya menurut Kusniawati dan Lahaya (2017). Penekanan anggaran ini dapat menimbulkan adanya senjangan anggaran dalam organisasi, karena organisasi disini menggunakan anggaran sebagai satu-satunya pengukur kinerja. Penekanan anggaran juga merupakan suatu desakan dari masyarakat untuk membuat anggaran dengan baik. Penekanan anggaran yang dimana anggaran merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam mengukur kinerja dari pihak-pihak yang bekerja pada organisasi perangkat daerah.

Penelitian ini dilakukan di organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Jepara. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa di Kabupaten Jepara pada tahun 2015 mengalami senjangan anggaran yang berupa belanja daerah yang ditujukan untuk masing-masing kecamatan. Kabupaten Jepara terdapat berita yang memberitakan tentang rencana belanjanya direncanakan

sebesar Rp. 1.742.000.000.000 dan biaya yang tercatat sebesar Rp. 2.019.847.686.000. (<http://bpkad.jeparakab.go.id/>). Jadi, penelitian ini untuk mengetahui apakah memang ada senjangan anggaran di organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jepara. Apakah pengaruh partisipasi penganggaran, asimetri informasi, budaya organisasi, komitmen organisasi dan penekanan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Perbedaan penelitian Dianthi dan Wirakusuma (2017) dengan penelitian ini yaitu dari variabel penelitian dan juga obyek dalam penelitian. Variabel yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu variabel penekanan anggaran sebagai variabel independen karena kebanyakan organisasi perangkat daerah menggunakan anggaran sebagai satu-satunya pengukur kinerja, sehingga pegawai cenderung melonggarkan anggaran agar anggaran mudah dicapai, dari situlah kemungkinan akan timbul senjangan anggaran. Obyek dalam penelitian yang dilakukan Dianthi dan Wirakusuma (2017) yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sedangkan penelitian ini berlokasi di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Asimetri Informasi, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Penekanan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Jepara”**.

1.2. Ruang Lingkup

Agar dalam penelitian ini bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya ruang lingkup atau batasan penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini membahas tentang senjangan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jepara.
2. Penelitian ini terdapat variabel yang berpengaruh terhadap senjangan anggaran yaitu partisipasi penganggaran, asimetri informasi, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan penekanan anggaran.

1.3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran ?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran ?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran ?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran ?
5. Apakah penekanan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran.

2. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran.
3. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap senjangan anggaran.
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran.
5. Untuk menganalisis pengaruh penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Masyarakat

Meningkatkan proses terciptanya keselarasan dan kesejahteraan masyarakat bersama melalui pelaksanaan anggaran yang baik.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara

Dari hasil penelitian diharap bisa berguna untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh partisipasi penganggaran, asimetri informasi, budaya organisasi, komitmen

organisasi dan penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran pada kinerja aparat pemerintah daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menambah wacana tentang penerapan anggaran kinerja pada organisasi perangkat daerah yang selanjutnya dapat dijadikan informasi tambahan atas penelitian dimasa mendatang.

